BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang di lakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham Demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata adanya demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sosialisasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Haryanto, 2018).

Sosialisasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Menurut (Nur Wardhani, 2018) makin tinggi tingkat sosialisasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat sosialisasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditekankan, karena rendah atau

Sosialisasi Politik.., Muhammad Lintar Pramukti, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, sosialisasi politik merupakan aspek yang sangat vital. Masyarakat atau publik dalam pemberi saham terhadap republik ini. Oleh karena itu, setiap pejabat atau wakil rakyat seringkali menyebut rakyat atau mengklaim rakyat ketika berbicara atau membuat kebijakan. Menurut Gaffar (1998) dalam (Roni Tabroni, 2014) menjelaskan bahwa partisipasi secara konvensional dilakukan melalui cara-cara yang umum dikenal dalam sistem politik tertentu, misalnya dengan menjadi anggota partai politik dan organisasi kepentingan. Sementara partisipasi tidak konvensional dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa, bahkan ada yang menempuh dengan cara-cara kekerasan.

Pada umumnya partisipasi politik bersifat mandiri. Partisipasi dilakukan atas inisiatif sendiri, yang didasarkan pada rasa kepedulian terhadap dunia politik. namun dalam praktiknya, adakalanya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor lain seperti diminta pergerakan oleh orang lain atau kelompok lain. Partisipasi politik yang dikenal sebagai *mobilized political participation*, di mana keterlibatan masyarakat dipicu oleh dorongan dari pihak lain, baik individu maupun kelompok. Dalam konteks inilah lembaga-lembaga resmi memainkan peran penting untuk memastikan partisipasi politik yang sehat dan terinformasi. Salah satu lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga Negara yang melaksanakan pemilihan umum. Meskipun pemilu di Indonesia mencakup berbagai jenis pemilihan seperti Pemilihan Presiden, DPR, dan DPRD, penelitian ini secara spesifik berfokus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Sebagai pelaksana pemilihan umum, juga termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Pilkada merupakan bentuk demokrasi lokal

yang langsung menentukan kepemimpinan di tingkat kota dan kabupaten, sehingga strategi sosialisasi politik yang digunakan oleh KPUD di tingkat daerah sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Komisi pemilihan Umum juga menyebutkan bahwa sosialisasi politik bagi pemilih pemula bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemikiran kritis para pemilih muda untuk memilih dan berpartisipasi menyelenggarakan pemilu yang bersih dan antik politik, memberi informasi terkait prosedur memilih (bagaimana cara memilih, bagaimana memastikan diri terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), bagaimana cara mengecek rekam jejak caleg, dan lain sebagainya, membuka wawasan pemilih tentang berbagai isu kepemiluan seperti *E-government* dan juga jejaring sosial lainya (Dila, 2020).

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap peran strategis warga negara juga dapat dianggap dapat meningkatkan kualitas demokrasi (Liando, 2016). Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar krusial dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, memberikan rakyat sarana untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas termaktub pada pembukaan UUD 1945. Pemilu sebagai lembaga demokrasi, menentukan perwakilan rakyat di MPR, DPR, dan DPRD, berperan bersama pemerintah dalam membentuk kebijakan politik dan mengelola negara (Harahap dll, 2021).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum. KPU juga bertanggung jawab atas berbagai tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemilu. Menurut (Irawan, 2024) KPU memiliki peran kunci dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan adil dan jujur. Menekankan bahwa independensi KPU sangat penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi di Indonesia. Menurut Nugroho dan Sukmariningsih, KPU

berperan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dengan meningkatkan integritas dan partisipasi pemilih (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).

Namun, untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini berlanjut secara efektif, perlu dilakukan sosialisasi politik yang efektif terhadap generasi muda. Sosialisasi politik menurut (Haryanto, 2018) merupakan suatu proses dimana anak-anak atau generasi muda diperkenalkan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang ada pada masyarakatnya, dan bagaimana cara mereka mempelajari peran yang diharapkan kelak ketika berusia dewasa. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Pilkada serentak 2024 di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi merupakan momentum penting dalam proses demokrasi. Dalam konteks Pilkada serentak 2024 di Kota Bekasi, sosialisasi politik menjadi krusial untuk memastikan partisipasi masyarakat yang aktif dan informatif. Kota Bekasi sebagai salah satu daerah urban yang berkembang, memiliki populasi yang beragam dan memerlukan pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, sosialisasi politik yang efektif dapat menjadi kunci untuk meningkatkan tingkat partisipasi Pilkada di Kota Bekasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi politik menjelang Pilkada 2024. Dalam rangka mendukung suksesnya pemilu, KPU Kota Bekasi aktif dalam mengadakan kegiatan sosialisasi politik di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan pentingnya sosialisasi politik kepada generasi muda. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan berbagai daerah, termasuk lingkungan komunitas dan kelompok masyarakat, untuk memastikan pesan pemilu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagai langkah adaptif di era digital, KPU Kota Bekasi juga menggelar webinar yang melibatkan berbagai narasumber ahli dan masyarakat umum. Webinar ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemilu, pentingnya menggunakan hak pilih, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi (Putu dkk, 2024).

Tingkat partisipasi pemilih Kota Bekasi memiliki populasi yang beragam, dengan adanya sosialisasi politik yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, sehingga dapat meningkatkan tingkat partisipasi Pilkada. Dengan adanya pendidikan politik banyak warga terutama generasi muda yang masih minim pengetahuan tentang proses pemilu dan pentingnya suara mereka, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, sosialisasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan dan organisasi masyarakat dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem pemilu, kandidat, dan isu-isu yang dihadapi.

Namun, di era digital saat ini, informasi yang salah atau menyesatkan mudah tersebar di media sosial, sehingga masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, sosialisasi politik yang baik akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak saat memilih.

Selain itu, sosialisasi politik juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung melalui diskusi, seminar, dan kegiatan komunitas. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab sosial dalam pemilu, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratisasi. Dinamika politik lokal Kota Bekasi memiliki keberagaman budaya dan kepentingan yang unik, sehingga sosialisasi politik yang mempertimbangkan konteks lokal dapat membantu merespons kebutuhan spesifik masyarakat dan mendorong dialog yang konstruktif antar berbagai kelompok.

Penggunaan media sosial sebagai alat untuk sosialisasi politik semakin meningkat. Oleh karena itu, memahami cara yang efektif untuk memanfaatkan platform ini dalam menyampaikan pesan politik menjadi penting untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian,

sosialisasi politik dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem pemilu dan isu-isu yang dihadapi. (Sazali et al., 2023). Dalam Pilkada 2024, di Indonesia kemarin mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi perhatian serius karena menandakan penurunan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang mendasar. Data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadi cerminan yang menggambarkan situasi ini secara jelas. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai angka 204.807.200 pemilih hanya 164.227.475 pemilih yang melakukan pencoblosan secara sah dalam pemilu 2024, Indonesia menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah golput, dengan sekitar 20,18% pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (Shofa et al., 2024). Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bekasi mengalami kenaikkan pada Pemilu 2024 hal tersebut disampaikan Anggota KPU Kota Bekasi, Faris Ismu Amir. Menurutnya, pada pemilu 2024 memiliki jumlah DPT sebesar 1.809.574 dari seluruh wilayah yang ada di Kota Bekasi (Kurniawati, 2024).

Gambar 1 1 Lampiran Perolehan Suara sah Pemilihan Umum tahun 2024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024

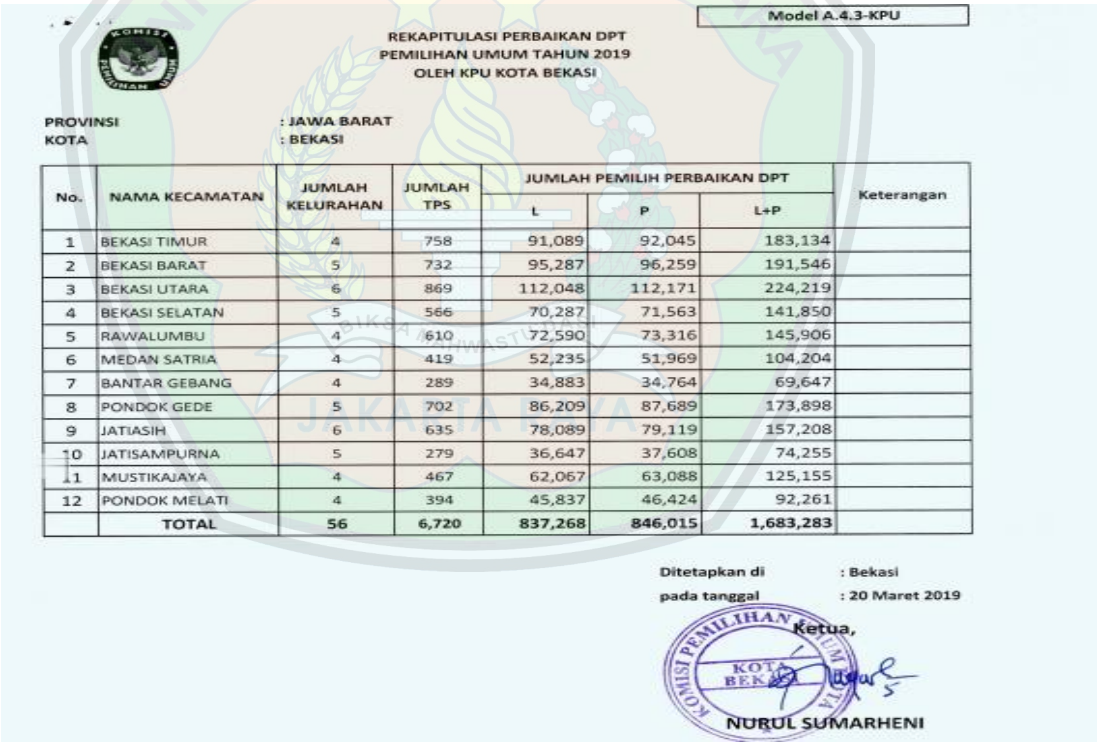
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					
		1 KOTA BEKASI 1	2 KOTA BEKASI 2	3 KOTA BEKASI 3	4 KOTA BEKASI 4	5 KOTA BEKASI 5	JUMLAH AKHIR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Partai Nasional						
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	17.328	17.114	16.901	13.987	17.214	82.544
	2. Partai Gerindra	31.387	43.329	26.060	28.551	27.449	156.776
	3. PDI Perjuangan	38.382	43.350	39.782	44.375	35.942	201.831
	4. Partai Golkar	37.935	37.279	75.443	27.766	26.806	205.229
	5. Partai NasDem	12.466	12.558	11.926	7.410	11.777	56.137
	6. Partai Buruh	4.302	3.667	3.699	2.922	3.919	18.509
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.491	1.416	1.546	2.573	2.968	11.994
	8. Partai Keadilan Sejahtera	53.871	57.476	52.459	62.718	69.615	296.139

Sumber : KPU Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas, bisa terlihat adanya jumlah partai politik yang mengikuti pada Pemilu 2024 dari setiap partai yang ikut serta dalam Pemilu 2024 masing masing partai memiliki suaranya masing masing dari tabel tersebut juga menjelaskan masing masing daerah yang ada di Kota Bekasi menjadi 5 bagian yaitu Kota Bekasi 1, Kota Bekasi 2, Kota Bekasi 3, Kota Bekasi 4, dan Kota Bekasi 5 dan tabel tersebut juga diisi dari 8 partai yang ikut serta dalam Pemilu 2024 seperti Partai Kebangkitan Bangsa (82.544), Partai Gerindra (156.776), PDI Perjuangan (201.831), Partai Golkar (205.229), Partai Nasdem(56.137), Partai Buruh (18.509), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (11.994), Partai Keadilan Sejahtera (296.139).

Gambar 1 2 Data Rekapitulasi Pilkada 2019 Kota Bekasi



Model A.4.3-KPU

REKAPITULASI PERBAIKAN DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KOTA BEKASI

PROVINSI : JAWA BARAT
KOTA : BEKASI

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PERBAIKAN DPT			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BEKASI TIMUR	4	758	91,089	92,045	183,134	
2	BEKASI BARAT	5	732	95,287	96,259	191,546	
3	BEKASI UTARA	6	869	112,048	112,171	224,219	
4	BEKASI SELATAN	5	566	70,287	71,563	141,850	
5	RAWALUMBU	4	610	72,590	73,316	145,906	
6	MEDAN SATRIA	4	419	52,235	51,969	104,204	
7	BANTAR GEBANG	4	289	34,883	34,764	69,647	
8	PONDOK GEDE	5	702	86,209	87,689	173,898	
9	JATIASIH	6	635	78,089	79,119	157,208	
10	JATISAMPURNA	5	279	36,647	37,608	74,255	
11	MUSTIKAJAYA	4	467	62,067	63,088	125,155	
12	PONDOK MELATI	4	394	45,837	46,424	92,261	
	TOTAL	56	6,720	837,268	846,015	1,683,283	

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 20 Maret 2019

Ketua,

NURUL SUMARHENI

Sumber: Jdih.kpu.go.id

Berdasarkan tabel diatas, bisa terlihat hasil dari Pemilih DPT pada Pemilu 2019 dari setiap Kecamatan yang berada di wilayah Kota Bekasi, kelurahan, tempat

pemungutan suara (TPS), dan juga data dari jumlah laki-laki dan Perempuan dari data tersebut. Dari data tersebut menjelaskan bahwa ada 12 kecamatan yaitu, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Rawalumbu, Medan Satria, Bantar Gebang, Pondok Gede, Jatiasih, Jatisampurna, Mustika jaya, dan juga Pondok Melati. Dari data tersebut menjelaskan total di setiap jumlah kelurahan, jumlah TPS, dan juga total dari pemilih DPT tersebut sebanyak 56 dari total kelurahan, 6.720 TPS, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 837.268, dan juga jumlah pemilih perempuan 846.015 yang menggunakan hak suaranya pada pemilu tersebut.

Melihat fenomena baru yang muncul pada era digital ini terkait isu-isu politik pada pemilu 2019 tersebut merupakan kegiatan politik yang memiliki tantangan saat melaksanakannya karena, pada 2019 tersebut partisipasi Pemilu 2019 mengalami penurunan yang disebabkan Covid 19, salah satu tantangan berat yang harus dihadapi adalah partisipasi pemilih pada saat itu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh ***International IDEA* yang berjudul "*Impact on Elections*"**

Merujuk data terakhir yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, selama pengawasan tahapan kampanye tatap muka, dari total 91.640 terdapat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan, 1.618 diberikan surat peringatan dan 197 pembubaran kegiatan kampanye. Oleh karena itu persiapan maksimal menyangkut hal teknis harus segera dilakukan terutama dalam perketatan protokol kesehatan (Hayati, 2018).

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Bekasi, pengalaman ini menjadi pelajaran penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi tidak hanya berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga memprioritaskan keselamatan masyarakat. Kota Bekasi sebagai wilayah dengan populasi yang beragam membutuhkan strategi yang matang, baik dalam pelaksanaan teknis maupun sosialisasi politik, agar seluruh proses Pilkada dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran, khususnya terkait protokol kesehatan. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada di Kota Bekasi diharapkan dapat menjadi

contoh sukses dalam penerapan prinsip demokrasi yang inklusif dan bertanggung jawab.

Pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menyatakan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Bekasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan DPT Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Kota Bekasi, Faris Ismu Amir. Menurutnya, jika pada Pemilu 2024, DPT kita mengalami kenaikkan sekitar 20.000 an. Itulah hasil kerja teman-teman KPU, hingga ditetapkan menjadi DPT, Jumat (20/9/2024). Sementara itu, DPT Pilkada mengalami penyusutan jika dibandingkan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Jika pada DPS jumlah pemilih mencapai 1.834.987 sementara ketika ditetapkan menjadi DPT jumlahnya menjadi 1.828.740, menyusut sebanyak 6.248 (Kurniawati, 2024).

Dalam Pilkada 2024 di Kota Bekasi KPU Kota Bekasi resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Bekasi dengan jumlah pemilih mencapai 1.828.740 penetapan DPT dilakukan dalam rapat terbuka di Hotel Aston, Kota Bekasi, Jumat (20/9/2024). Dari total 1.828.740 pemilih, jumlah laki-laki mencapai 898.283, perempuan 930.457 sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai 3.637 dari total 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Total DPT sendiri menyusut sekitar 6.248 pemilih. Dari awalnya sebanyak 1.834.987 pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi 1.828.740 dalam DPT. Sementara itu, 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi, jumlah pemilih di Kecamatan Jatisampurna tembus 82.238 rinciannya pemilih laki-laki 40.009, perempuan 42.229, TPS 173 (Kurniawati, rri.co.id, 2024).

Tabel 1. 1 DPT Pilkada Kota Bekasi

No	Nama Kecamatan	Jumlah TPS		Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P
1	Bantargebang	153		39.857	39.863	79.720
2	Pondok Melati	194		46.937	48.478	95.685
3	Medan Satria	240		57.390	58.332	115.722
4	Pondok gede	344		82.007	85.756	167.777
5	Jatiasih	354		85.132	88.635	173.767
6	Mustikajaya	298		76.170	78.235	154.405
7	Rawalumbu	324		79.990	82.915	162.815
8	Bekasi Barat	395		95.469	98.883	194.352
9	Bekasi Selatan	328		75.889	80.640	156.529
10	Bekasi Timur	384		96.764	101.015	197.779
11	Bekasi Utara	484		122.329	125.614	247.943
12	Bulak Kapal	2		842		

Tabel ini menyajikan data persebaran pemilih dalam Pilkada Kota Bekasi berdasarkan kecamatan. Masing-masing kecamatan ditampilkan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah pemilih laki-laki, jumlah pemilih perempuan, serta total jumlah pemilih (laki-laki + perempuan). Dari data ini dapat dilihat gambaran umum partisipasi penduduk Kota Bekasi dalam Pilkada, berdasarkan jenis kelamin dan sebaran wilayah administratif.

Kecamatan Bekasi Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah TPS dan pemilih terbanyak, yaitu 484 TPS dan 247.943 pemilih. Jumlah ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh kecamatan lainnya. Pemilih perempuan di wilayah ini juga tercatat lebih banyak dari laki-laki, dengan selisih sekitar 3.285 orang. Hal ini

menunjukkan bahwa wilayah ini memerlukan perhatian khusus dalam pendistribusian logistik pemilu dan strategi kampanye karena potensi suara yang besar.

Disusul oleh Bekasi Timur, dengan total 384 TPS dan 197.779 pemilih. Kecenderungan yang sama terlihat, yaitu pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki. Sementara itu, wilayah dengan jumlah pemilih paling sedikit adalah Bulak Kapal, dengan hanya 2 TPS dan total 842 pemilih. Tidak terdapat rincian jumlah laki-laki dan perempuan di wilayah ini, yang kemungkinan besar merupakan TPS khusus seperti untuk rumah sakit, Lapas, atau tempat pelayanan terbatas. Kecamatan Bekasi Barat, Pondok Gede, dan Jatiasih juga memiliki jumlah pemilih yang tinggi, masing-masing berada di atas 150.000 pemilih.

Di seluruh wilayah, data menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan selalu lebih banyak daripada laki-laki, meskipun perbedaan jumlahnya bervariasi dari yang kecil (seperti di Bantar Gebang) hingga yang cukup besar (seperti di Bekasi Timur dan Selatan). Jumlah TPS per kecamatan pun bervariasi, menyesuaikan dengan jumlah pemilih dan luas wilayah. Misalnya, Bekasi Barat memiliki 395 TPS untuk menampung sekitar 194 ribu pemilih, sementara Mustikajaya memiliki 298 TPS dengan sekitar 154 ribu pemilih.

Gambar 1 3 Rekapitulasi Pilkada Serentak Kota Bekasi Tahun 2024



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menilai bahwa ada kecenderungan kejenuhan di kalangan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya, yang turut berdampak rendahnya angka partisipasi Pilkada Kota Bekasi 2024. Angka partisipasi Pilkada di Kota Bekasi hanya mencapai 55,81 persen, dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 73 persen (arya, 2024).

Berdasarkan laporan angka partisipasi Pilkada 2024 di Kota Bekasi yang di dapatkan Rakyat Bekasi.com melalui. Hasil Pilkada dari pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kota, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 1.828.740 jiwa. Angka partisipasi sebesar 55,81 persen atau sekitar 1.020.084 jiwa, terdiri dari 468.920 laki-laki dan 551.165 perempuan. Sementara, sebanyak 808.656 masyarakat tidak memilih atau Golput dan 43.710 lainnya adalah surat suara yang tidak sah. Jumah keseluruhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bekasi adalah 3.673 TPS yang tersebar di 12 kecamatan dan 56 kelurahan (arya, 2024).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terlebih dahulu dari berbagai referensi sebagai acuan untuk terlaksananya penelitian yang menjadi perbedaan serta keunikan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk memastikan adanya keunikan dan keberhasilan pada penelitian ini. Dengan itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai referensi termasuk konsep untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada didalam penelitian. Penelitian terkait dengan sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi pada Pilkada Serentak Tahun 2024, dapat peneliti uraikan pada berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Khasanul Muna dengan judul penelitian "Strategi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kudus Terhadap Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Serentak 2024" ditulis pada tahun 2023 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman pada pemilih pemula serta

meningkatkan kesadaran politik tentang bagaimana mempersiapkan pemilih pemula dan memastikan partisipasi mereka lebih optimal pada Pemilu.

Selanjutnya penelitian oleh Asep setiawan, Nur Islam, Tia Marlinda Sari dengan judul "Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Kecamatan Gunung Labuhan Dan Kecamatan Baradatu Tahun 2023" pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU khususnya bagi pemilih semula, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki program pendidikan politik di masa depan

Kemudian penelitian yang berjudul "Kualitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu" yang ditulis oleh La Ode Arwan, Andi La Ode Muhammad Arhan, Wa Ode Suharni, Fitri, Junaid Gazalim yang ditulis pada tahun 2024. Dengan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KPU harus meningkatkan kualitas sosialisasi politik yang efektif dari KPU, media massa, dan juga kelompok masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi agar kualitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada Pemilu menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul "Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi Pada Pilkada Serentak 2024"

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Bekasi

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan, pada penelitian ini adalah bagaimana Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Politik dalam mengedukasi warga Kota Bekasi untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024 di Kota Bekasi

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi melaksanakan kegiatan sosialisasi politik dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka pada Pilkada 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sebelumnya telah dijabarkan. Maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah ini dapat digunakan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian pada masalah yang sama dengan pembahasan yang lebih dalam.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana sosialisasi politik berperan penting bagi masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi politik di Kota Bekasi.

1) Dapat mengetahui lebih permasalahan yang sering terjadi dan keberadaan Komisi Pemilihan Umum dalam menyikapi pentingnya sosialisasi politik untuk mensukseskan Pemilu 2024.
2) Bermanfaat menambah pemahaman yang lebih baik terhadap pemula, masyarakat dapat mengarahkan upaya untuk meningkatkan keterlibatan sosial dan politik mereka, memotivasi mereka untuk aktif dalam pembentukan kebijakan dan proses demokrasi.